

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**



**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 selesai disusun sesuai yang direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diatur dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa setiap unit kerja wajib melaporkan hasil kinerja program, kegiatan dan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan : (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan halal untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat; (4) Memantapkan pasar pangan secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengakses pangan yang bersifat pokok. Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudian dijabarkan dalam kegiatan berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan selama tahun 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, yang secara umum target Indikator sasaran telah tercapai.

Capaian kinerja tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, serta dukungan pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga ke tingkat lapangan, baik institusi pemerintah, swasta maupun petani.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuananya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.



## DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Tugas Pokok dan fungsi .....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Sumberdaya Aparatur Daerah.....	5
D. Maksud dan Tujuan .....	7
E. Sistematika.....	7
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis .....	9
2.1.1. Visi dan Misi.....	10
2.1.2. Tujuan dan Sasaran .....	10
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	11
2.1.4. Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	13
2.1.5 Caseding dan Pohon Kinerja .....	17
2.1.6 Rencana Aksi .....	33
2.2. Keuangan Tahun 2025.....	42
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	42
2.4. Indikator Kinerja Utama.....	44
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	45
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	45
3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025.....	45
3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	47
3.1.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra .....	50
3.1.4. Realisasi dan Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	51

3.1.5. Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan lainnya.....	52
3.1.6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53
3.2. Realisasi Keuangan .....	60
3.3. Perbaikan Rencana Kinerja.....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Rekomendasi.....	66

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel	2.1	Tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Ketahanan .....	12
Tabel	2.2.1	Alokasi Belanja dan Pendapatan Tahun 2025 .....	42
Tabel	2.3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	45
Tabel	3.1.1	Skala Nilai Perangkat Daerah.....	44
Tabel	3.1.2	Penjelasan Hasil Perhitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.....	46
Tabel	3.1.3	Target Out Came Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025....	47
Tabel	3.1.4	Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target RPJMD Dalam Renstra .....	48

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025 disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja selama tahun 2025 dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 000.8.6.3/31/SETDA.ORG/2025 tanggal 5 Januari 2025 perihal Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah. Adapun teknis penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah ( Bab II Pasal 2), bidang kewenangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan adalah ***melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan bidang serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan, pengawasan dan pemantauan, pengkajian, analisis dan pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam upaya menjamin Ketahanan Pangan Kabupaten.***

Sejalan dengan Rencana Strategis tahun 2025-2029 maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 1(Satu) tujuan yang dijabarkan dalam 2 lindikator Kinerja dalam melaksanakan program kegiatan di tahun 2025 Selanjutnya sasaran tersebut diwujudkan dalam **4 (empat) Program Utama** dan **1 (satu) Program Pendukung** dengan **13 (tiga belas) kegiatan** dan **42 ( empat puluh dua ) subkegiatan**. Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 berhasil dengan baik.

Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai Misi Nomor 1 (satu) yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan sasaran : “ **Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan.**”

yang mana misi tersebut bertujuan untuk “ **Mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan** ”. Khusus Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan tugas mengkoordinasikan peningkatan produksi dan kegiatan lainnya sehingga aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi dapat dilaksanakan seoptimal mungkin sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029.

Untuk dapat menjalankan proses tersebut di atas, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana kegiatan dimaksud selain sebagai upaya menjalankan tupoksi juga untuk menjalankan capaian-capaian baik program ataupun kegiatan, sedangkan Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan pangan tahun 2025. Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini berangkat dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Kendala yang paling menonjol adalah masih terbatasnya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai lembaga yang berfungsi untuk mempersiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan Kabupaten.

Untuk mengatasi masalah/kendala tersebut bukanlah hal yang mudah karena untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil masih belum bisa diupayakan dari instansi terkait serta pengadaan sarana dan prasarana butuh biaya yang cukup mahal bila dilihat dari kondisi anggaran daerah yang cukup terbatas sekarang ini.

Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala di atas, antara lain menjaga dan memelihara inventarisasi sarana dan prasarana yang ada, menjalin hubungan yang harmonis dengan Instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Provinsi dalam peningkatan Ketahanan Pangan serta memfokuskan dan menajamkan program dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam tahun Pertama RENSTRA 2025-2029 ini diukur dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (Performance Gap) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 dengan kategori capaian dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capain	Katagori Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan.	Indeks Ketahanan Pangan	70	78,71	100	
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	65	72,81	100	

Hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa pencapaian indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 adalah Sangat baik. Sedangkan untuk penyerapan anggaran adalah (96,38%) dari dana sebesar **Rp. 5.104.378.120** dan teralisasi sebesar Rp.4.919.471.550

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dasar Hukum pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon II dalam struktur organisasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur,ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 (Bab II Pasal 2 ),bidang kewenangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan adalah **melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan, pengawasan dan pemantauan, pengkajian, analisis dan pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam upaya menjamin Ketahanan Pangan Kabupaten**. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2012 sebagai perubahan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 200 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP),Dinas Ketahanan Pangan juga bertugas sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada:

- a). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni1999 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan;
- b). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2. Tugas Pokok

Menurut Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas Pokok Membantu Bupati Tanjung Jabung Timur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

## 3. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan Teknis di bidang Ketahanan Pangan;
2. Penyelenggaraan ketersediaan Pangan, kerawanan pangan,distribusi pangan, cadangan pangan penganekaragaman komsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi, pangan, cadangan pangan penganeka ragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman komsumsi dan keamanan;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

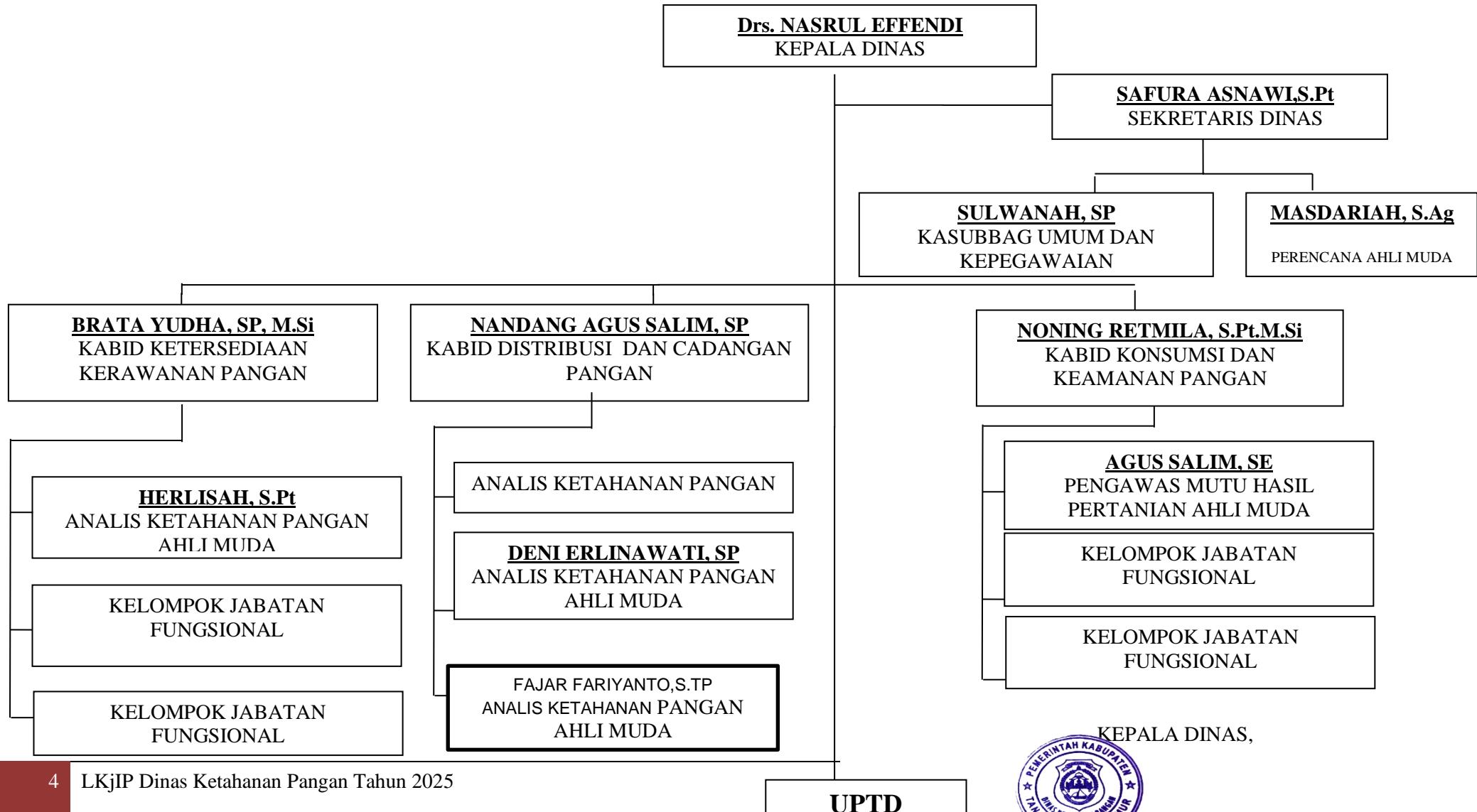
## B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 1 (Satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 3 (Tiga) Kepala Bidang dengan Rincian sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Sekretaris Dinas
  - Kasubbag umum dan Kepegawaian
  - Staf Fungsional Perencana Ahli Muda

- ❖ Kepala Bidang Penganekaragaman Komsumsi dan Keamanan Pangan
  - Staf Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- ❖ Kepala Bidang Distribusi Pangan
  - Staf Fungsional Analis Ketahanan Pangan
- ❖ Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.
  - Staf Fungsional Analis Ketahanan Pangan

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
PER 31 DESEMBER 2024**



### C. SUMBER DAYA APARATUR DAERAH

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember Tahun 2025 memiliki sumber Daya Aparatur sebanyak 22 (Dua puluh dua) Orang. Dari Jumlah tersebut 6 (enam) Orang Pejabat Struktural, 9 (Sembilan) Orang Jabatan Fungsional sedangkan sisanya 7 ( Tujuh) Orang merupakan staf Fungsional Umum. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya Pegawai, jumlah Sumber Daya Aparatur belum cukup memadai untuk kebutuhan, sedangkan ditinjau dari kualitas dan tingkatan pendidikan, belum cukup memadai untuk kebutuhan yang ada dan perlu peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pengembangan wawasan dan Keterampilan dengan mengikuti sertakan pegawai pada diklat dan sekolah dimasa yang akan datang.

Rincian secara lengkap Sumber daya Aparatur Daerah yang di miliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat di lihat pada tabel berikut Ini :

No	Uraian	Golongan				Pendidikan						
		IV	III	II	1	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SLTA
1	Jabatan Struktural											
	Kepala Dinas	1					1					
	Sekretaris Dinas	1					1					
	Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan	1				1						
	Kepala Bidang Distribusi Pangan	1					1					
	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1				1						
	Kepala Subbagian Umum dan Kepergawaiuan		1				1					
	JUMLAH	5	1	-	-	2	4	-	-	-	-	-

2	Jabatan Fungsional											
	Fungsional Perencana Ahli Muda	1					1					
	Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda		3				3					
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda		1				1					
	Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama		4				4					
	<b>JUMLAH</b>	1	8	-	-	-	9	-	-	-	-	-
3	Staf Fungsional Umum	1	3	3			3	2			2	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	-	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>	-

## **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Bupati Tanjung Jabung Timur selaku pimpinan tertinggi di daerah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 dan juga untuk memenuhi kewajiban Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024 dan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan LKjIP Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP 2025**

Sistematika penyusunan LKjIP berdasarkan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2015 yaitu tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
- 6) Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV. Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, isu strategis, kebijakan, strategi, dan program kegiatan pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan; dan indikator-indikator kinerja Dinas, berorientasi pada hasil yang akan dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dan mungkin terjadi serta melakukan antisipasi terhadap perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rumusan pokok-pokok Rencana Strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1. VISI DAN MISI**

Visi Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur adalah **Membangun Bersama Rakyat untuk Bahagia dan sejahtera (MERATA)** dengan misi bupati dan wakil Bupati Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah
2. Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
3. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berdaya Saing, tata kelola Pemerintahan yang kredibel dan Kondusif

Dari 3 ( Tiga ) misi Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tersebut guna mendukung misi diatas Dinas Ketahanan Kebupaten Tanjung Jabung Timur menelaah misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah pada misi ke 2 (Dua ) yang berbunyi “ **Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.** dan pada misi yang ke 4(Empat) yang berbunyi : **Mewujudkan reformasi birokrasi guna mendukung**

**Peningkatan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan Harmonis.**

### **2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **➤ Tujuan**

Merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan yang dituangkan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan INMEN Nomor 02 Tahun 2025 . serta Dasar Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Tujuan ini ditetapkan harus mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Selanjutnya secara prinsipil tujuan tersebut akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Adapun tujuan dari perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2025-2029 adalah“ **Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan serta meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel**”.

#### **➤ Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan.;
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

### **2.1.3 STARATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mewujudkan Visi dan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. rumusan misi berserta tujuan dan sasaran yang dirumuskan, perlu penetapan mengenai upaya pencapaian tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijelaskan dengan arah kebijakan. “

**Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan”.** dengan strategi sebagai berikut :

- Meningkatkan pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilisasi harga pangan, diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan
- Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya serta penguatan cadangan Pangan.
- Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan /olahan.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilisasi harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan kerawanan pangan
2. Penguatan Koordinasi lintas sektoral Ketahanan Pangan Daerah
3. Fasilitas penyediaan sarana Prasarana Lumbung pangan untuk mendukung kemandirian pangan
4. Penyediaan stok cadangan pangan Pemerintah

## 5. Pengawasan dan pembinaaan mutu pangan

## 6. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran

Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada table di bawah ini :

NO	OPERASIONALI SASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD 2025-2029	KET
	Terwujudnya daya sektor pertanian dan Perikanan	Tahap I Mendorong Swasembada Pangan pada Sektor Industri Pertanian dan Perikanan serta Mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur  Tahap II Meningkatkan Ketahanan Pangan di Sektor Industri Pertanian dan Perikanan serta Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Konservasi Ekologi dan Budaya Lokal;  Tahap III Mendorong Daya Saing Produk Unggulan Daerah di Sektor Industri Pertanian dan Perikanan serta Meningkatkan Efektivitas Kelembagaan Pariwisata dan UMKM;  Tahap IV. Memperkuat daya saing sektor pertanian dan Perikanan dengan mengintegrasikan sektor hulu dan hilir yang selaras dengan kebijakan ekonomi dalam negeri Membangun Kolaborasi Antarstakeholder untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah dan Kepariwisataan Berazaskan Identitas Budaya Lokal serta Perdagangan Berbasis Dukungan Teknologi Informatika (TI);  Tahap V. Mengoptimalkan Potensi Daerah untuk Mendukung Ekonomi Biru dan Hijau serta Pertumbuhan Industri dan Pariwisata.	1. Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan, diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan; 2. Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, lantai jemur dan sarana dan prasarana Pendukung kemandirian Pangan; 3. Penyediaan Stok Cadangan Pangan ; 4. Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah; 5. Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan; 6. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan .	Program Perioritas : 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan  Program Penunjang : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **2.1.4. PROGRAM , KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN**

Program Dinas Ketahanan Pangan mencerminkan tugas dan fungsi yang berisikan kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut terdiri dari:

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

###### **1.1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja**

Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

1.1.2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

1.1.4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD.

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.1.7. Evaluasi Kinerja

1.1.8. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral.

###### **1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :**

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.

1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD.

###### **1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :**

1.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

1.3.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya

###### **1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :**

1.4.1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

- 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - 1.4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
  - 1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - 1.4.6. Fasilitas Kunjungan Tamu.
  - 1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
    - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
    - 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  - 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
    - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas Jabatan .
    - 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.
    - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya.
- 2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**
    - 2.1. Kegiatan Penyediaan infratruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :
      - 2.1.1. Penyediaan infrastruktur Pendukung Kemandirian pangan lainnya.
  - 3. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT.**
    - 3.1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Dengan subkegiatan sebagai berikut :

- 3.1.1. Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya.
  - 3.1.2. Penigkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
  - 3.1.3. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota.
  - 3.1.4. Pemantauan Stok Pangan.
  - 3.1.5. Penyediaan informasi harga pangan Tingkat Produsen dan konsumen wilayah Kabupaten/Kota .
  - 3.1.6. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota.
  - 3.1.7. Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis.
- 3.2. Kegiatan Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :
    - 3.2.1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
    - 3.2.2. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota .
  - 3.3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi dengan subkegiatan sebagai berikut :
    - 3.3.1. Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun.
    - 3.3.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis Sumber Daya lokal.
    - 3.3.3. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi Per Kapita per Tahun.

#### **4. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**

- 4.1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan subkegiatan sebagai berikut :
  - 3.1.1. Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

4.2. Kegiatan Penanganan Kerawanan pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan subkegiatan sebagai berikut :

4.2.1. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota

4.2.2. Pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi

4.2.3. Penyusunan Peta situasi Kewaspadaan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota.

## **5. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

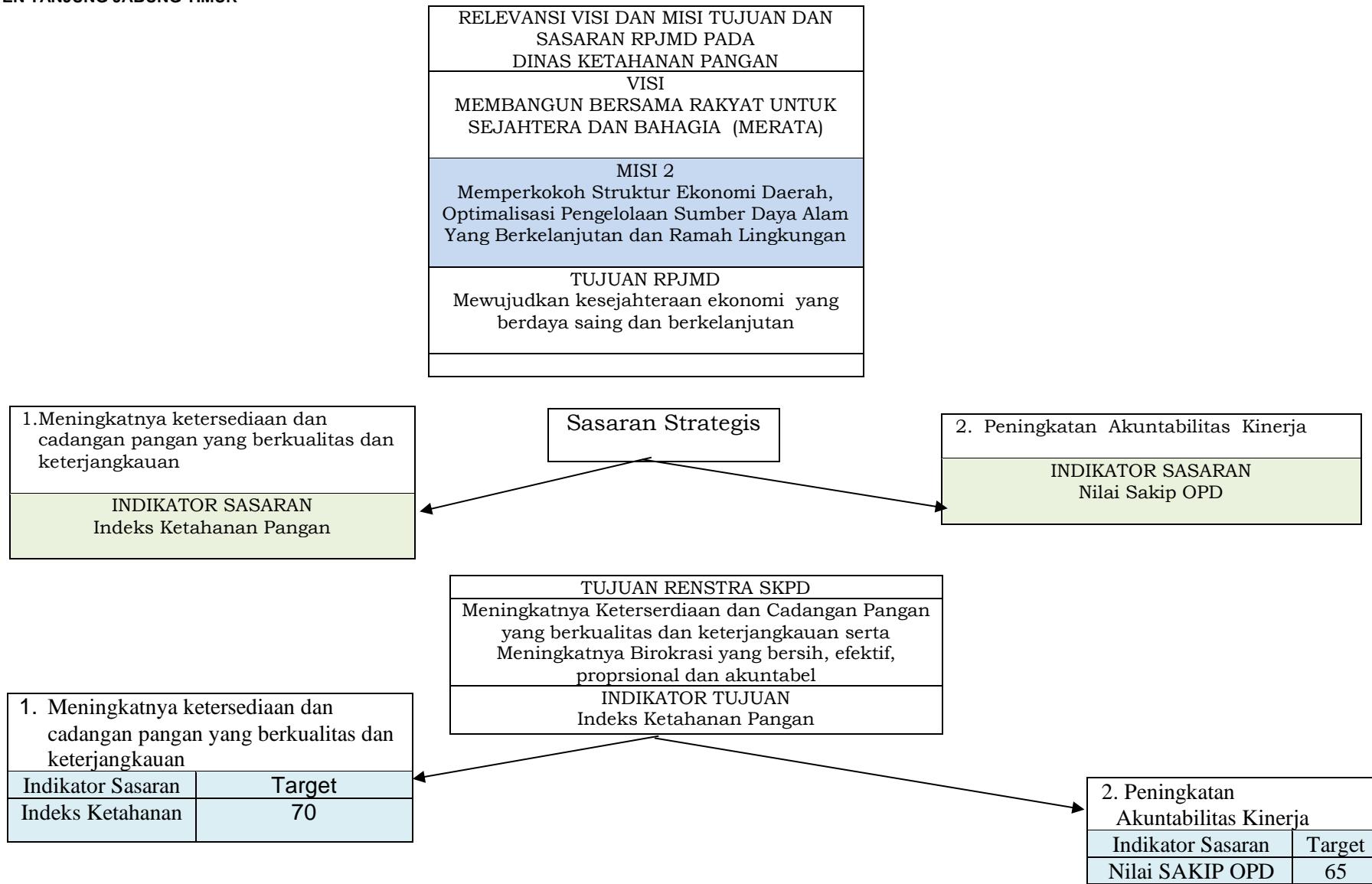
5.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :

5.1.1. Rekomendasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota.

### **2.1.5. CASCADING DAN POHON KINERJA.**

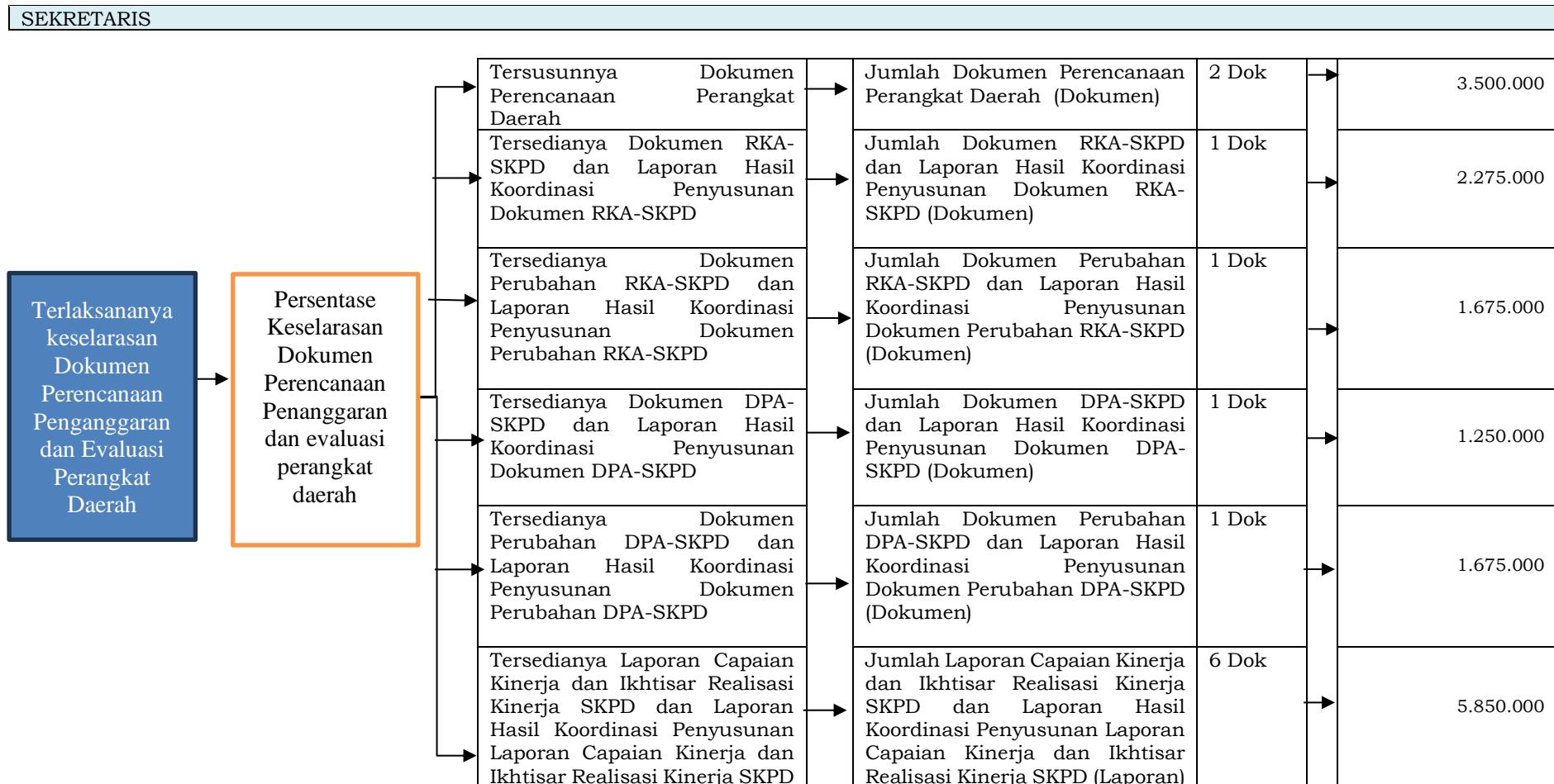
Cascading dan pohon kinerja diaplikasi sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis dan tertuang sebagai berikut:

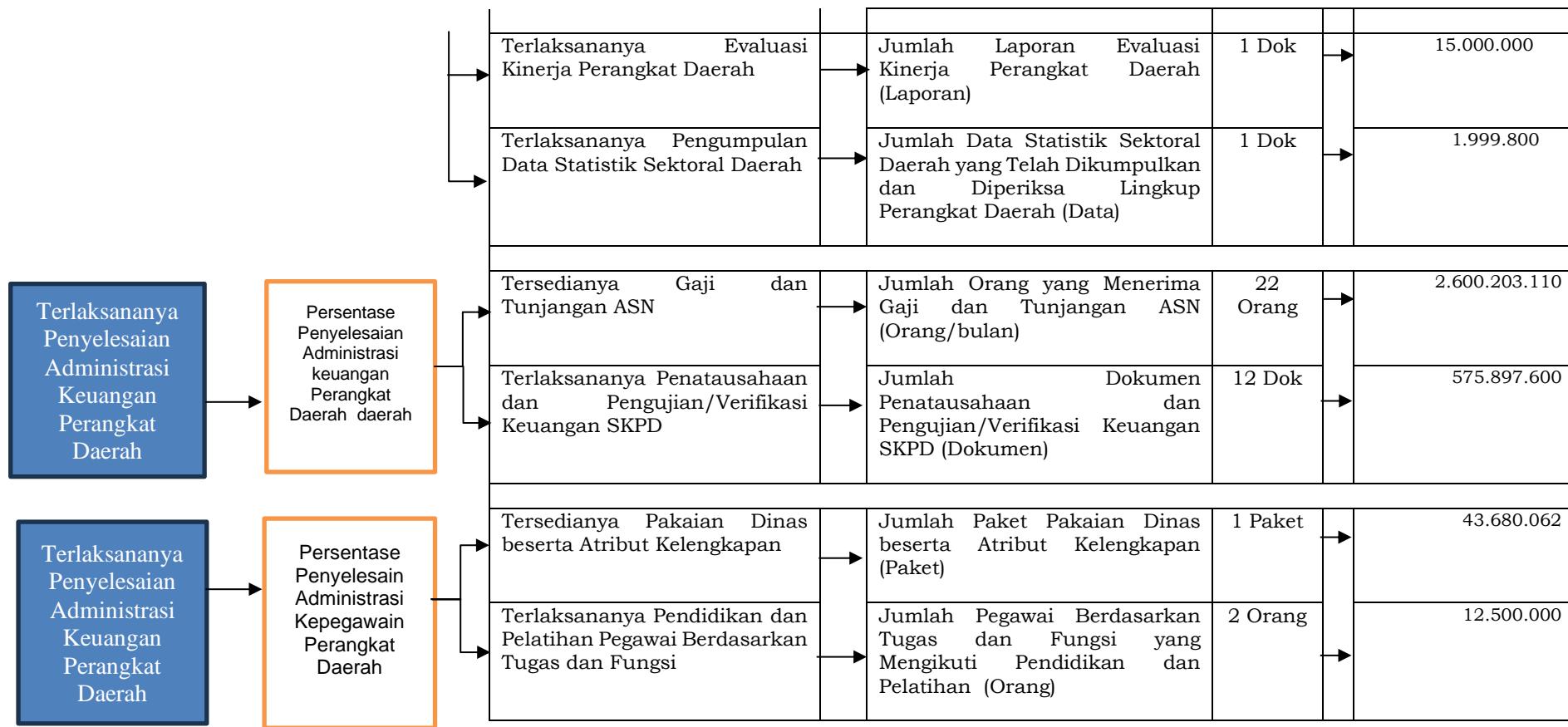
## CASCUING



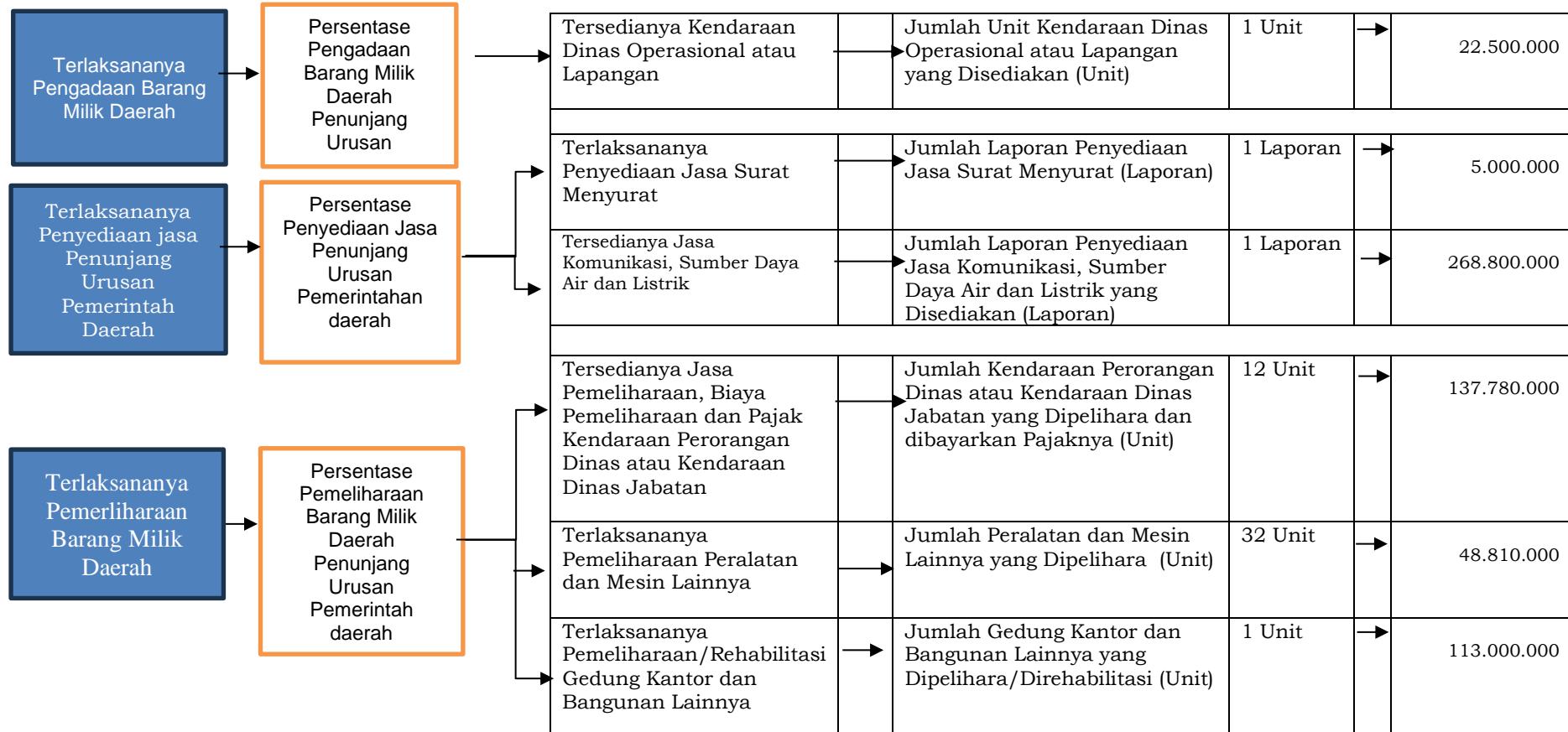
ESELIN III	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja

ESELON IV			
SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET	ANGGARAN



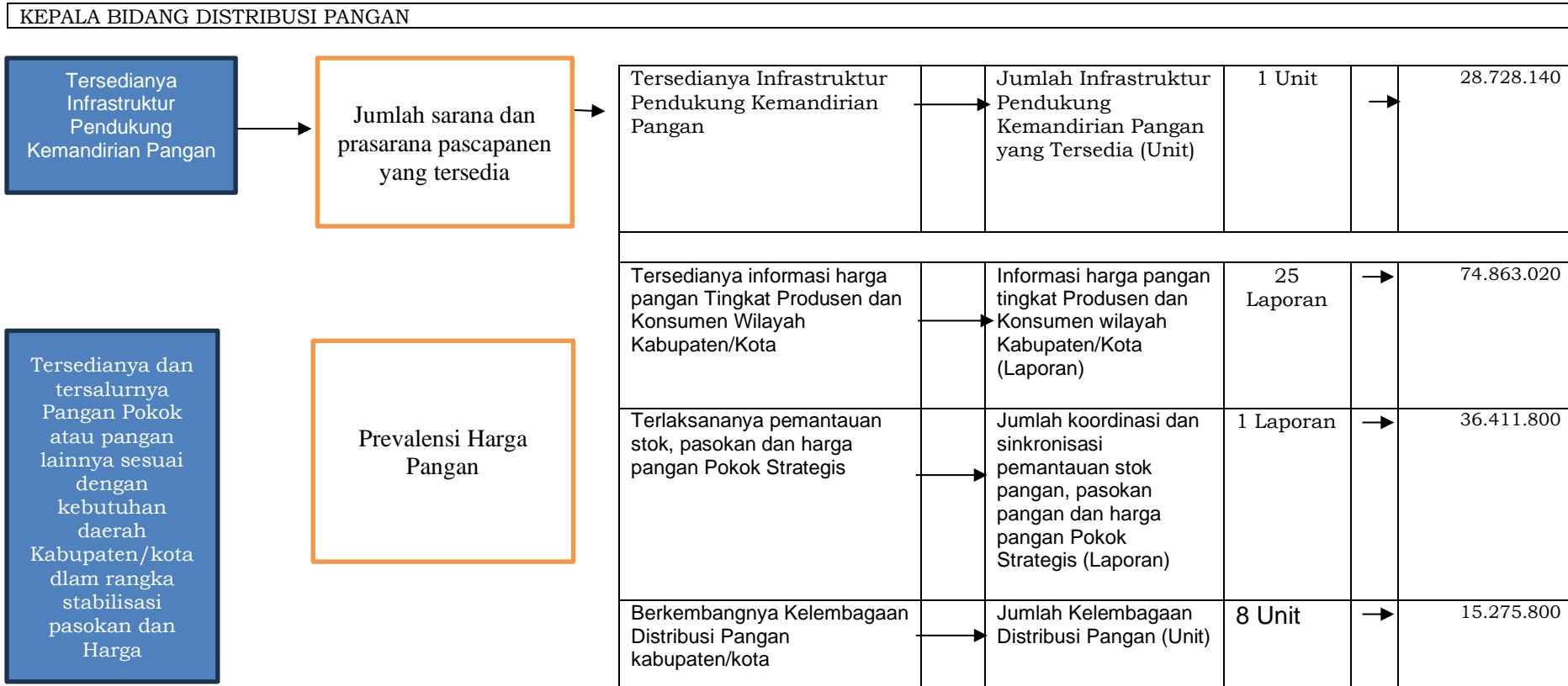


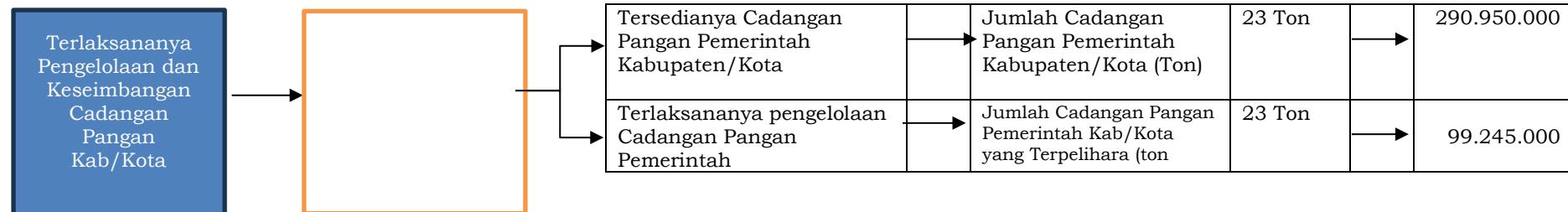
Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	14.024.710
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	144.066.716
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	37.150.000
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	8.258.900
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1 Dok	5.500.000
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	1.500.000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	43.000.000



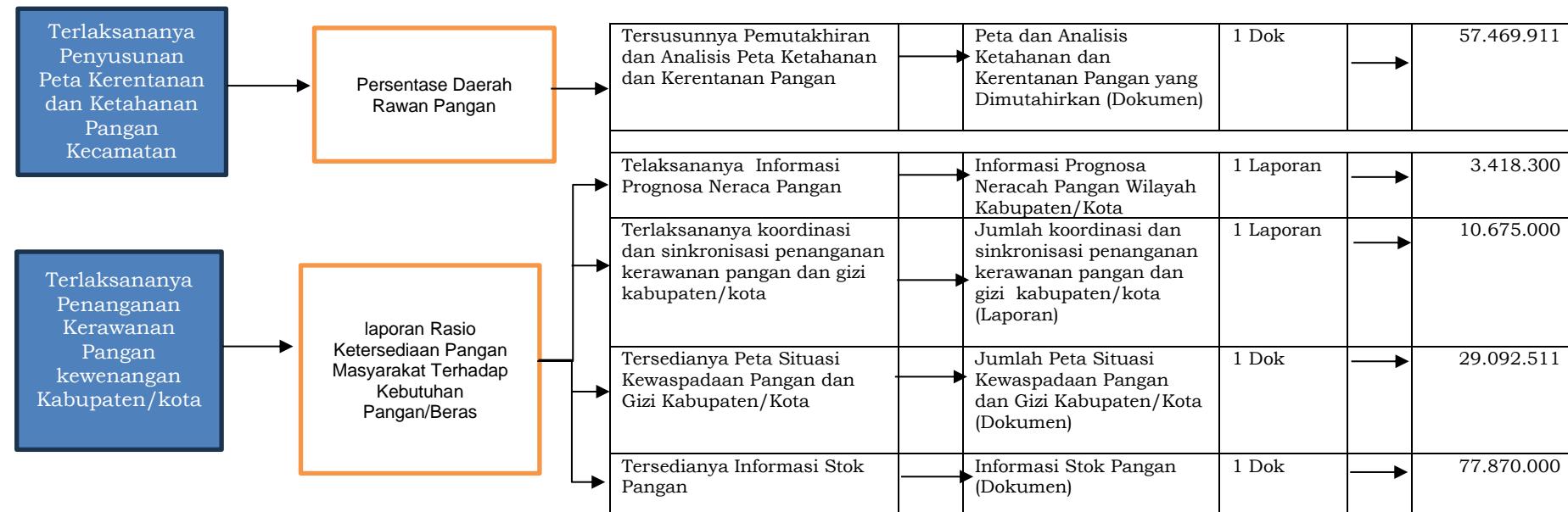
ESELON III		INDIKATOR KINERJA
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA

ESELON IV		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
SASARAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN





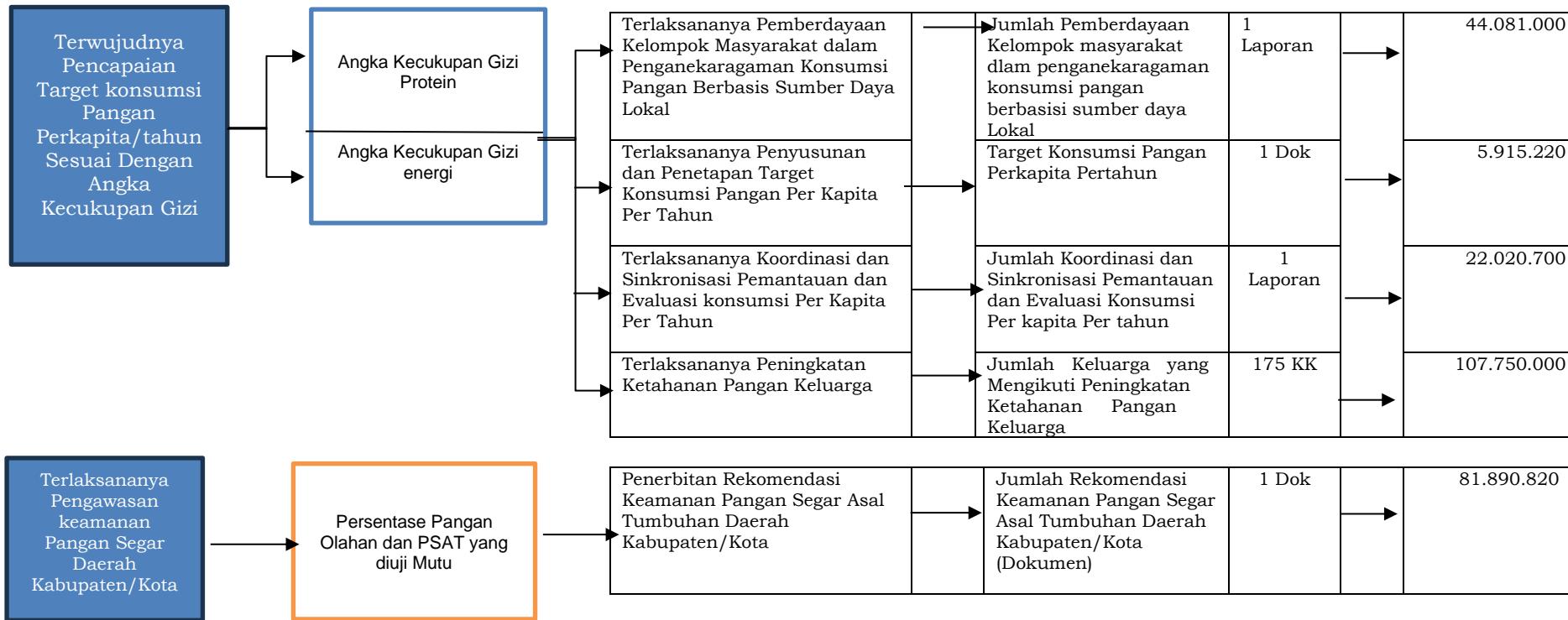
**BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN**



ESELON III		INDIKATOR KINERJA
SASARAN KEGIATAN		

ESELON IV		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
SASARAN SUBKEGIATAN	KEGIATAN			

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

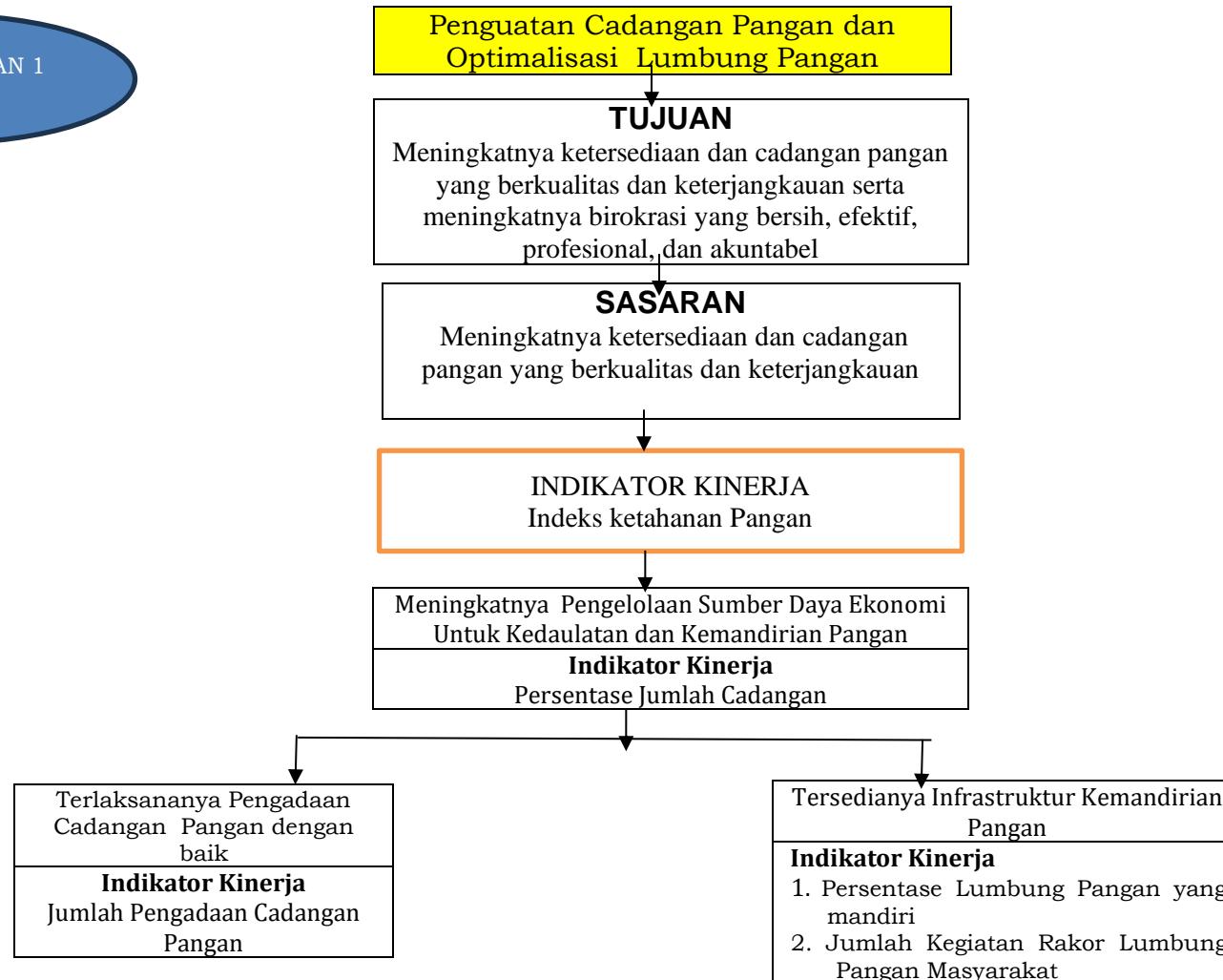


POHON KINERJA DINAS  
KETAHANAN PANGAN TAHUN  
2025-2029

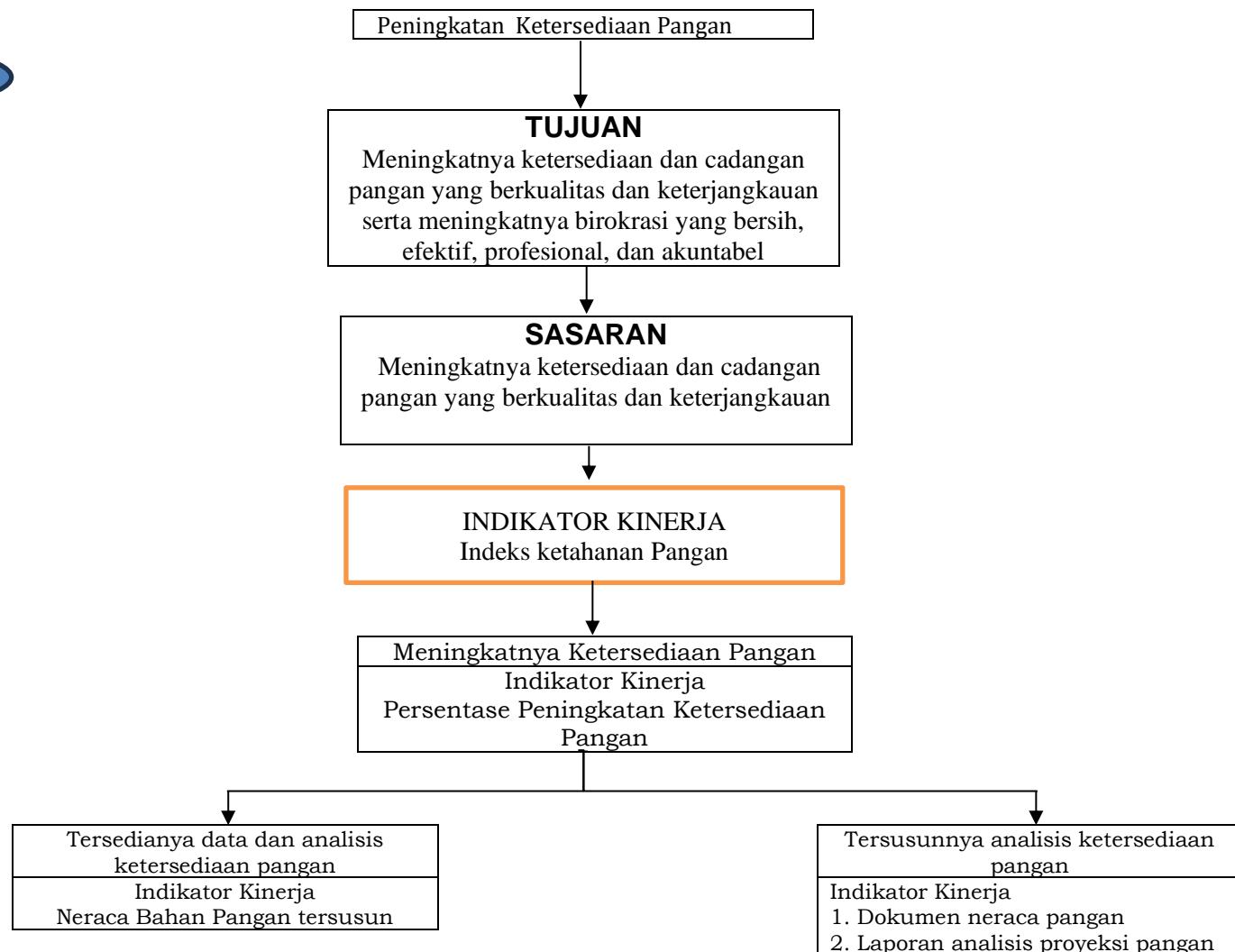
PERMASALAHAN DINAS  
KETAHANAN PANGAN

1. Belum tercukupinya Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah berupa beras( ideal Cadangan Pangan pemerintah Tanjab Timur 30-40 Ton	2. Masih belum optimalnya cadangan pangan masyarakat/desa berupa lumbung pangan masyarakat	3. Ketersediaan bahan pangan masih belum merata	4. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan B2SA (Beragam, bergizi, seimbang dan aman) masih belum optimal sehingga belum mencapai skor PPH ideal	5. Masih fluktuatifnya harga pangan untuk komoditi pangan tertentu sehingga hal ini menyebabkan inflasi tinggi , daya beli masyarakat berkurang, menurunkan laju pertumbuhan ekonomi dan berpotensi mempertinggi jumlah penduduk miskin atau rentan rawan pangan	6. Masih terdapatnya desa yang rentan dan rawan pangan ( Prioritas 1,2 dan 3)	7. Masih minimnya produk pangan segar asal tumbuhan yang teregistrasi	8. beredarnya produk pangan yang mengandung zat kimia berbahaya bagi kesehatan
--	--	---	--	--	---	---	--

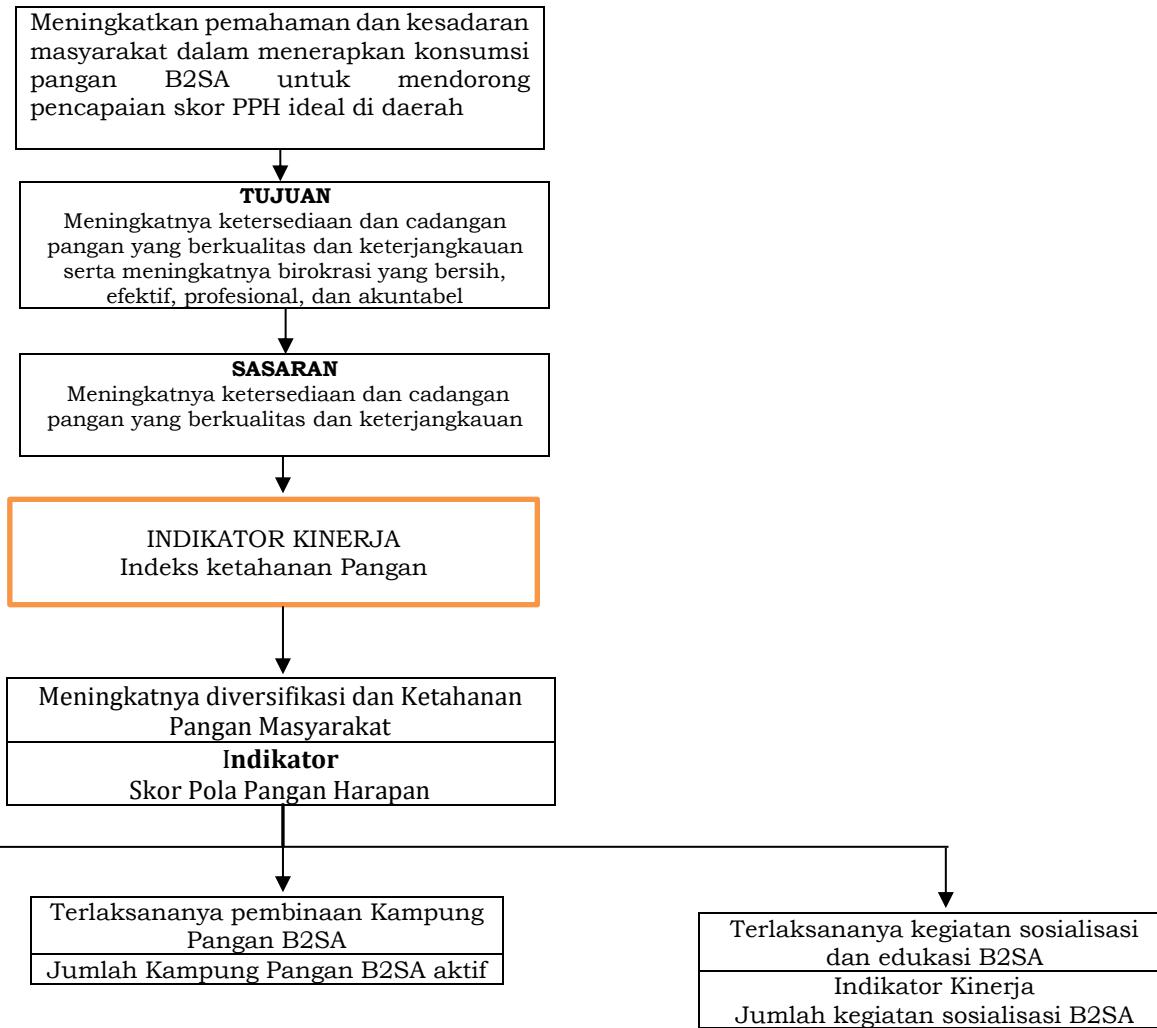
## PERMASALAHAN 1 DAN 2



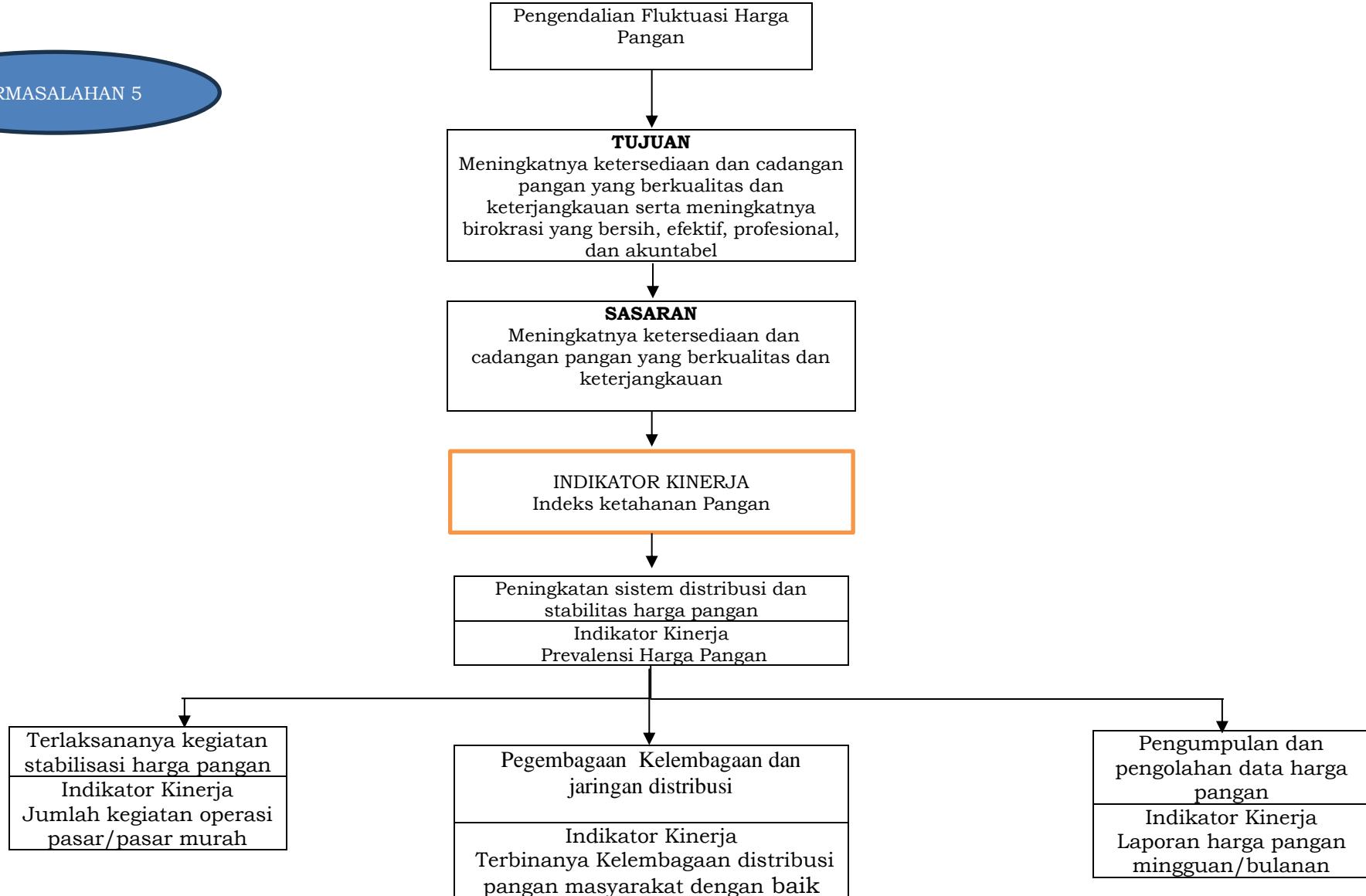
### PERMASAHAN 3



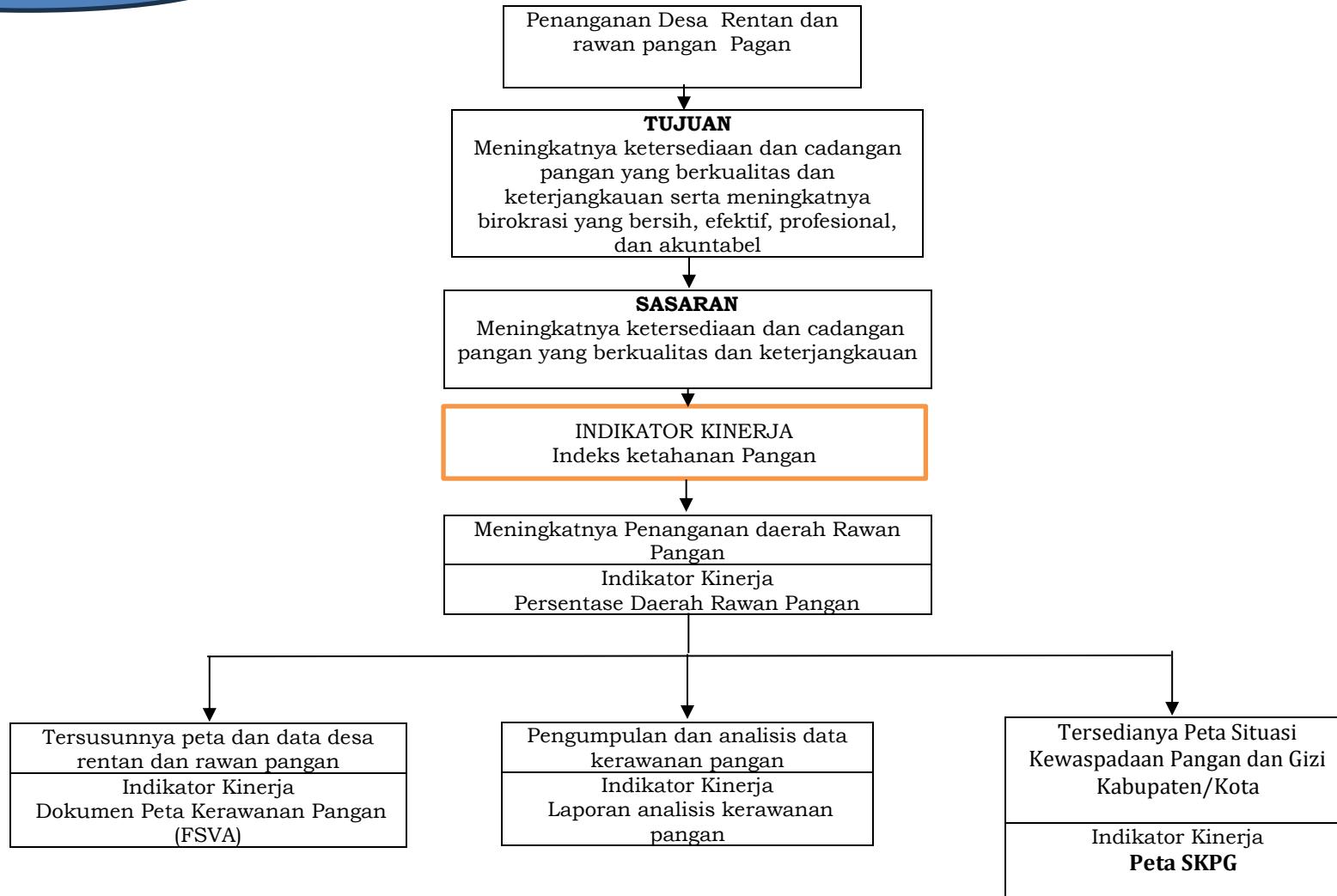
#### PERMASALAHAN 4



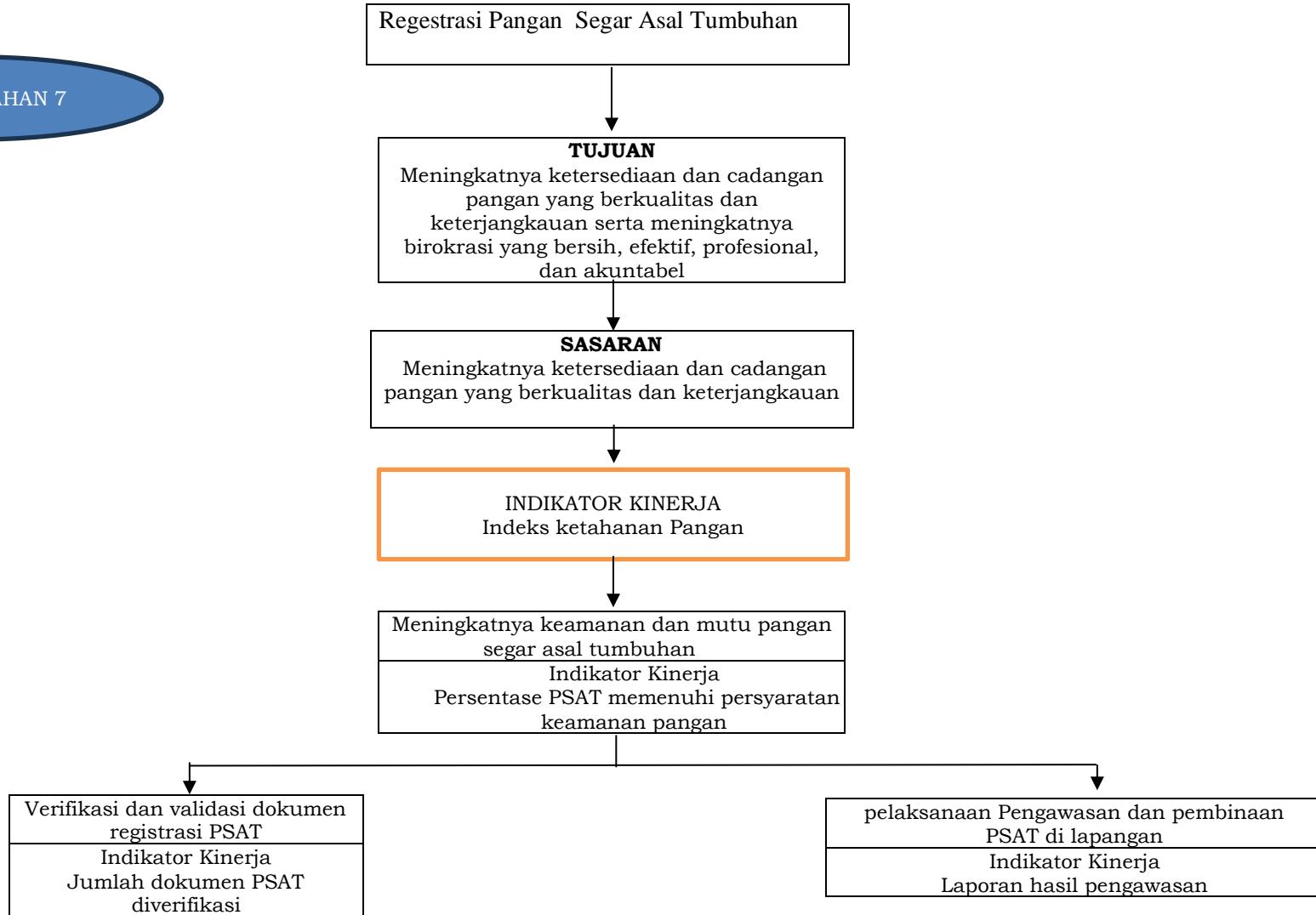
## PERMASALAHAN 5



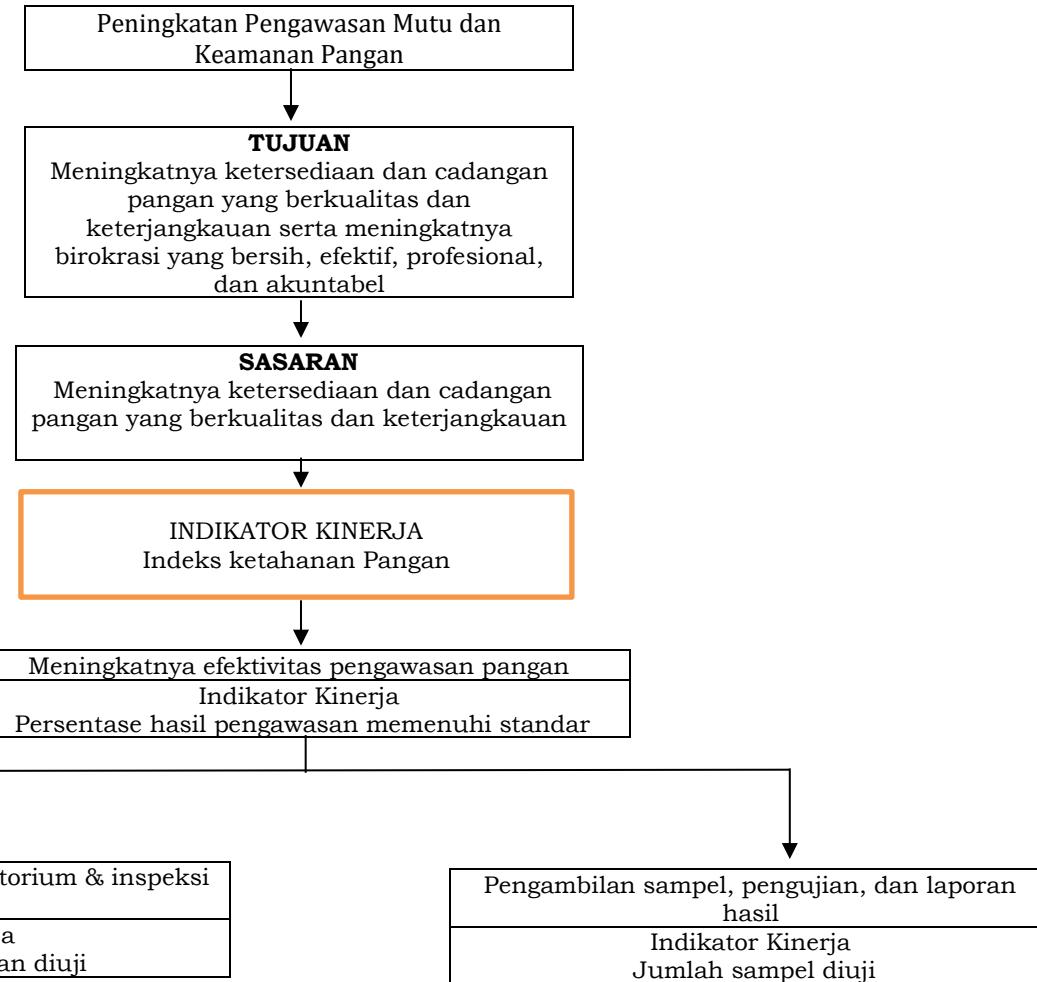
## PERMASALAHAN 6



PERMASALAHAN 7



PERMASALAHAN 8



### **2.1.6. Rencana Aksi**

Tujuan, sasaran, program serta tolak ukur untuk mencapai indikator tersebut diatas dituangkan dalam rencana aksi Dinas Ketahanan Pangan, yang tertuang sebagai berikut:

#### **RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025**

## RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				No	Aksi Kegiatan	JADWAL KEGIATAN												Target Output (Keluaran)	Penggungjawab	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/subkegiatan	Jumlah Anggaran (Dalam Ribu Rp)					
		T W	T W	T W	T W			TR1			TR2			TR3			TR4												
		1	2	3	4			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan	Indeks Ketahanan Pangan	70	1	1	1	1	1												70	Dinas Ketahanan Pangan									
																				100,00 %	Bid. Distribusi Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	28.728.140					
								Terlaksananya kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota											100%	Bidang Distribusi Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.728.140						
								1.1.1	Terlaksananya Rakor Lembaga Pangan Masyarakat	√	√	√	√						1		1	Penyediaan Infrastruktur pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	28.728.140					
								2	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat											93,6	Bid. Distribusi Pangan; bid. Ketersediaan; bid.konsumsi dan keamanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	781.625.840					
								2.1	Melaksanakan Pemantauan baik ketersediaan maupun distribusi pangan dan keterjangkauan harga pangan kepada masyarakat										100	Bid. Distribusi Pangan ; bid. Ketersediaan pangan ; bid. Konsumsi dan keamanan pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan Harga Pangan	319.413.920						

				2.1. 1	Melaksanakan Rakor Pokja Ahli Ketahanan Pangan									√			1	Sekretariat Dinas	1 Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3.825.000
				2.1. 2	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui kampung pangan terpadu B2SA			√								150	Bid. Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	2 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	107.750.000	
				2.1. 3	Pengembangan Kelembagaan	√		√		√			√			8	Bid. Distribusi Pangan	3 Pengembangan kelembagaan distribusi Pangan pokok	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	15.275.800	
				2.1. 4	Pemantau stok pangan di gudang penggilingan padi	√	√	√	√	√	√	√	√	√		1	Bidang Ketersediaan Pangan	4 Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	77.870.000	
				2.1. 5	Tersedianya informasi harga pangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25	Bid. Distribusi Pangan	5 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tk. Produsen dan konsumen Wilayah Kabupaten/kota	Informasi Harga Pangan Tk Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/kota	74.863.020	
				2.1. 6	terlaksananya penyusunan prognosa neraca pangan				√							1	Bidang Ketersediaan Pangan	6 Penyusunan prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/kota	3.418.300	
				2.1. 7	Terlaksananya Pemantauan Stok pasokan dan harga pangan	√		√		√			√			1	Bid. Distribusi Pangan	7 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pangan, Pasokan Pangan dan harga Pangan Pokok Strategis	36.411.800	
				2.2	Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi data serta Menyediakan beras Cadangan Pangan										100%	Bid. Distribusi Pangan	Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten/kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	390.195.000		
				2.2. 1	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah	√	√	√	√		√		√			23	Bid. Disribusi Pangan	1 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang Terpelihara (ton)	99.245.000	

				2.2. 2	Pembelian beras cadangan pangan pemerintah						√	√			23	Bid. Distribusi Pangan	2 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	290.950.000
				2.3	Melaksanakan survey Pola Pangan Harapan dan Sosialisasi Kader Pangan dan Pangan Lokal										100%	Bid. Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita pertahun	Persentase Capaian Konsumsi Pangan	72.016.920
				2.3. 1	Terlaksananya Penyusunan Target Konsumsi Pangan					√			√		1	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1 Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi Pangan perkapita Per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5.915.220
				2.3. 2	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber sumber daya pangan lokal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	2 Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeka Ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	44.081.000
				2.3. 3	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita pertahun	√		√		√			√		1	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	3 Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi Konsumsi Per kapita Per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	22.020.700
				3	terlaksananya Pengawasan daerah rawan pangan										78,49%	Bidang Ketersediaan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Percentase Daerah Rentan Rawan Pangan	97.237.422
				3.1	Koordinasi dan sinkronisasi data										100%	Bidang Ketersediaan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Percentase Penanganan Kerawanan Pangan	57.469.911
				3.1. 1	tersusunnya pemutakhiran dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1		1 Subkegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	57.469.911
				3.2	Melaksanakan intervensi kewaspadaan Pangan dan Gizi, serta Penyusun peta.										100	Bidang Ketersediaan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Percentase Penyelesaian Peta	39.767.511
				3.2. 1	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi	√		√	√		√		√		1	Bid. Ketersedian Pangan	1 Koordinasi dan sinkronisasi penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	10.675.000

				3.2. 3	Tersusunnya peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1	Bid. Ketersediaan Pangan	3 Penyusunan Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Kabupaten/kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota	29.092.511	
				4	Peningkatan Pengawasan pangan segar dan pangan olahan												100%	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan	Program Pengawasan dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	81.890.820	
				4.1	Melakukan Pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan dan pangan lokal	√			√		√			√	√		100%	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan PSAT dan Pangan Lainnya	81.890.820	
				4.1. 1	Melakukan Pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan dan pangan lokal	√		√		√			√				1	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan	Subkegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	81.890.820	
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD		65	5																		
				5.1	Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%	Bid. Sekretariat Dinas	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Penanggaran dan evaluasi perangkat daerah	33.224.800	
				5.1. 1	Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√				√						2	Bid. Sekretariat Dinas	1 Menyusun Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	3.500.000		
				5.1. 2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD										√		1	Bid. Sekretariat Dinas	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok.)	2.275.000	

				5.1.3	Tersedianya Dok DPA-SKPD					√					1	Bid. Sekretariat Dinas	3	koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dok).	1.675.000
				5.1.4	Tersedianya Dok DPA-SKPD	√									1	Bid. Sekretariat Dinas	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dok).	1.250.000
				5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							√			1	Bid. Sekretariat Dinas	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dok)	1.675.000
				5.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja			√	√	√			√		6	Bid. Sekretariat Dinas	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	adalah Jumlah Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja ( Dokumen)	5.850.000
				5.1.7	Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah					√					1	Bid. Sekretariat Dinas	7	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.999.800
				5.1.8	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√		√		√			√		1	Bid. Sekretariat Dinas	8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	15.000.000
				5.2	Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										100%	Bid. Sekretariat Dinas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	3.176.100.710	
				5.2.1	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	22	Bidang Sekretariat Dinas	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	adalah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan PNS/ASN	2.600.203.110

				5.2. 2	Pembayaran Honorarium penaggung Jawab Pengelola keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	Bidang Sekretariat Dinas	2 Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD(Dok)	575.897.600
				5.3	Melaksanakan Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah										100%	Bid. Sekretariat Dinas	Admistrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Persentase Admistrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	56.180.062	
					Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya					√					1	Bid. Sekretariat Dinas	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.680.062	
				5.3. 1	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	√				√					2	Bid. Sekretariat Dinas	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan( Orang)	12.500.000	
				5.4	Melaksanakan administrasi Umum Perangkat Daerah										100%	Bid. Sekretariat Dinas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.500.326	
				5.4. 1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor			√					√		1	Bid. Sekretariat Dinas	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	14.024.710	
				5.4. 2	Tersedianya Bahan Logistik	√		√		√					2	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	2 Penyediaan bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	37.150.000	
				5.4. 3	pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	√		√		√			√		1	Bid. Sekretariat Dinas	3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	144.066.716	
				5.4. 4	cetakan dan penggandaan	√		√		√			√		1	Bid. Sekretariat Dinas	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	8.258.900	

				5.4. 5	tersedianya bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	√		√		√		√		1	Bid. Sekretariat Dinas	5 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	5.500.000
				5.4. 6	terlaksananya fasilitas kunjungan tamu			√						1	Bid. Sekretariat Dinas	6 Fasilitas Kunjungan Tamu	adalah Jumlah poran Fasilitas Kunjungan Tamu ( Laporan)	1.500.000
				5.4. 7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	√		√		√		√		1	Bid. Sekretariat Dinas	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	43.000.000
				5.5	Pengadaan Kendaraan Operasional									100%	Bid. Sekretariat Dinas	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	22.500.000
				5.5. 1	Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas			√						1	Bid. Sekretariat Dinas	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	22.500.000
				5.6	Melaksanakan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									100%	Bid. Sekretariat Dinas	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	273.800.000
				5.6. 1	Terlaksananya penyediaan Jasa surat menyurat	√		√		√		√		1	Bid. Sekretariat Dinas	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan surat menyurat (Laporan)	5.000.000
				5.6. 2	Tersedianya Jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	√	√	√	√	√	√	√	√	1	Bid. Sekretariat Dinas	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	268.800.000
				5.7	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah									100%	Bid. Sekretariat Dinas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	299.590.000

					5.7.1	Tersedianya Jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	√		√	√	√	√	√	12	Bid. Sekretariat Dinas	1	kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit) .	137.780.000
					5.7.2	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	√		√	√		√	√	27	Bid. Sekretariat Dinas	2	kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (unit).	48.810.000
					5.7.3	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya					√			1	Bid. Sekretariat Dinas	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit).	113.000.000
JUMLAH																			5.104.378.1 20

Muara Sabak, Oktober 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Drs. NASRUL EFFENDI  
Pembina Utama Muda /IV C  
NIP. 19700107 198908 1 001

## 2.2. KEUANGAN TAHUN 2025

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan dengan anggaran belanja dan pendapatan sebagaimana tabel berikut::

Tabel 2.2.1

Alokasi Belanja dan Pendapatan Tahun 2025

Uraian	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Perubahan
Pendapatan	0	0
Belanja Daerah	<b>5.500.891.800</b>	<b>5.104.378.120</b>
a. Banja Operasi .	<b>5.379.665.800</b>	<b>4.926.661.570</b>
b. Belanja Modal	<b>121.226.000</b>	<b>177.716.550</b>

## 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025 Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 mengacu pada Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029. Penetapan Kinerja Tahun 2025 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber data
1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan	Indeks Ketahanan Pangan	<p>Rumus IKP:  <math>IKP = (IK \text{ Ketersediaan} + IK \text{ Akses} + IK \text{ Pemanfaatan}) / 3</math></p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK Ketersediaan = Indeks ketersediaan pangan</li> <li>• IK Akses = Indeks akses pangan</li> <li>• IK Pemanfaatan = Indeks pemanfaatan pangan</li> </ul> <p>Nilai masing-masing indeks berada pada rentang <b>0-1</b> (hasil normalisasi).</p> <p><b>Contoh Perhitungan</b>  Misalnya diperoleh nilai indeks sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Ketersediaan Pangan = <b>0,72</b></li> <li>• Indeks Akses Pangan = <b>0,68</b></li> <li>• Indeks Pemanfaatan Pangan = <b>0,75</b></li> </ul> <p>Maka:</p> $IKP = (0,72 + 0,68 + 0,75) / 3$ $IKP = 2,15 / 3 = 0,72$ <p><b>Interpretasi</b>  Nilai IKP sebesar <b>0,72</b> menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan berada pada kategori "<b>Tahan</b>".</p> <p><b>0,00 – 0,20</b> : Sangat Rentan  <b>0,21 – 0,40</b> : Rentan  <b>0,41 – 0,60</b> : Cukup Tahan  <b>0,61 – 0,80</b> : Tahan  <b>0,81 – 1,00</b> : Sangat Tahan</p>	Badan Pangan Nasional
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	<p>Rumus Perhitungan Nilai SAKIP  Nilai SAKIP OPD=</p> $\text{Nilai Capaian Kinerja} \times 0,6 + \text{Nilai Tata Kelola} \times 0,4$	Berdasarkan <b>Peraturan Menteri PANRB No. 53/2014</b> ,

#### 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan indikator kinerja utama yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Kinerja	Target Sasaran Pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan serta meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel		Indeks Ketahanan Pangan	70	71	72	73	74	75
			Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan	Indeks Ketahanan Pangan	70	71	72	73	74
			Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .	Nilai Sakip OPD	65	67	70	72	75

## **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

Untuk menilai kekurangan dan keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja memiliki esensi penting dalam evaluasi kinerja yang berdasarkan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasi visinya.

### **3.1. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja bertujuan untuk memberikan penghargaan maupun sangsi kepada pelaksana kegiatan guna meningkatkan kinerja Perangkat Daerah. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan permasalahan dan solusi dalam mengejar pencapaian target kinerja sampai dengan akhir periode renstra 2025-2029.

#### **3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025**

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indicator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kreteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam table di bawah ini :

**Tabel 3.1.1. Skala Nilai Perangkat Daerah**

No	Jumlah Nilai	Katagori	Keterangan
1	Nilai 85 s.d 100	Sangat Berhasil	<b>Sangat Baik</b>
2	Nilai 70 < 85	Berhasil	<b>Baik</b>
3	Nilai 55<70	Cukup Berhasil	<b>Cukup Berhasil</b>
4	Nilai < 55	Kurang Berhasil	<b>Kurang Berhasil</b>

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan diukur dengan cara “**Maximize Target**” yaitu apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Pencapaian dari sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan gambaran umum indikator perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur dari masing- masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2 Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4
1	Indeks Ketahanan Pangan	70	Secara umum, skala IKP berada dalam rentang 0–100, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan <b>ketahanan pangan semakin kuat</b> (ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan masyarakat semakin baik). Nilai 78,71 menempatkan Tanjung Jabung Timur pada kategori <b>sedang-baik atau moderat</b> , mengindikasikan bahwa secara agregat kondisi ketahanan pangan daerah relatif stabil.
4	Nilai SAKIP	65	Semakin besar realisasi Nilai LKjIP Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat Kabupaten, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan semakin baik.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tingkat capaian **Target Outcome** masing-masing indikator kinerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.3. Target Outcome Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025.

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Fisik (%)
1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan serta meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel		Indeks Ketahanan Pangann	70	78,71	100
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan	Indeks Ketahanan Pangann	70	78,71	100
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .	Nilai SAKIP OPD	65	72,81	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Timur , 2025

Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat sebagai berikut yaitu Secara umum diperoleh nilai Pencapaian Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, dapat dimasukkan ke dalam kategori Capaian Kinerja **Sangat Baik**. Penjelasan secara lengkap atas capaian indikator kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 .

### 3.1.2. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Tahun 2025 merupakan tahun ke-5 RPJMD 2025-2029, Dinas Ketahanan

Pangan secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 dan dua tahun sebelumnya secara rinci disampaikan pada tabel berikut: Beberapa hal yang perlu dianalisa dan dievaluasi dalam pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan pada masing-masing sasaran dan indikator sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	REALISASI			Capaian
					2023	2024	2025	
1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan serta meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel		Indeks Ketahanan Pangan	70	70,65	71,22	78,71	100
			Indeks Ketahanan Pangan	70	70,65	71,22	78,71	100
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	65	72,36	72,51	72,81	100

Berdasarkan analisis terhadap 1 indikator tujuan dan 2 indikator sasaran dapat diketahui bahwa Ke-2 indikator kinerja mendapat kategori memenuhi target . Hasil dari capaian kinerja tersebut turut didukung oleh program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam PK Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 dan merupakan kesinambungan substansi program/kegiatan yang sudah berjalan pada periode sebelumnya. Berikut adalah gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam PK Tahun 2025 yang dirinci dalam sub bab berikut ini.

**TUJUAN** Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan serta meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel

Meningkatnya Ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan Keterjangkauan serta meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif , profesional dan

akuntabel merupakan salah satu tolok ukur , yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu Indeks Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Tujuan	Capaian Tahun 2024	2025			Katagori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketahanan pangan	71,22	70	78,71	100	Memenuhi Target

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk tujuan Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan Keterjangkauan serta meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator ini termasuk dalam kategori memenuhi target dengan persentase capaian sebesar 100 %.

#### TUJUAN 1 SASARAN 1

Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan

Tujuan 1 Sasaran 1 Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan . Sasaran ini diukur menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu indeks Ketahanan Pangan Untuk melihat capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut. Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “ Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2025			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan serta meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	70	78,71	100

Capaian indikator kinerja 1 Indeks Ketahanan Pangan pada Tahun 2025 sebesar 78,71, dari target sebesar 70 , maka capaian kinerja mencapai 100% atau kategori capaian memenuhi target.

#### TUJUAN 1 SASARAN 2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Tujuan 1 Sasaran 2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sasaran ini diukur menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP OPD Untuk melihat capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut. Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “ Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2025			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan serta meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	Nilai	65	72,81	100

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2025 sebesar BB (72,81 ) dari target BB, maka capaian kinerja mencapai Target

### 3.1.3. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan target jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tertuang dalam pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025-2029. Secara rinci capaian kinerja jangka menengah tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.4**  
Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi Tahun 2025	Capaian Target Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 11/8 *100
1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan serta meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel		Indeks Ketahanan Pangan	70	71	72	73	74	75	78,71	100
			Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan	70	71	72	73	74	75	78,71	100
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKP OPD	65	67	70	72	75	80	72,81	100

### 3.1.4. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan target Nasional

Target Indikator Indeks Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 70 dan tereaisasi sebesar 78,71, hal ini mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang baik dan relatif stabil. Namun demikian, upaya peningkatan tetap diperlukan agar ketahanan pangan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, dan ketimpangan social.

Faktor pendukung IKP bersifat multidimensional dan saling terkait. Penguatan ketahanan pangan memerlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan daya beli, kualitas konsumsi, serta tata kelola pangan yang efektif dan berkelanjutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- a. Pada dimensi **ketersediaan pangan**, meskipun pasokan pangan relatif mencukupi, daerah masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi produksi akibat perubahan iklim, keterbatasan produktivitas pertanian, serta adanya tekanan alih fungsi lahan. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan pangan belum sepenuhnya stabil sepanjang tahun dan rentan terhadap gangguan eksternal.
- b. Dari sisi **akses pangan**, masih terdapat kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rentan yang terdampak oleh kenaikan harga pangan dan inflasi. Distribusi pangan di beberapa wilayah belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan jarak akses ke pusat-pusat perdagangan, sehingga mempengaruhi kemampuan sebagian rumah tangga dalam memperoleh pangan secara berkelanjutan.
- c. Sementara itu, pada dimensi **pemanfaatan pangan**, permasalahan gizi seperti stunting, akses air bersih dan sanitasi yang belum merata, serta rendahnya pengetahuan gizi pada sebagian masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan akses pangan yang relatif baik belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas konsumsi dan pemanfaatan pangan yang optimal.

Adapun perbandingan capaian indikator sasaran kinerja Indeks Ketahanan Pangan dengan target Daerah dan Nasional sebagaimana tabel dibawah ini :

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Provinsi Jambi 2025		Nasional	
			Target	Capain	Target	Capain
Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	78,71	70	76,16	73,2	73

Sumber data Badan Pangan Nasional

### 3.1.4. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

#### 3.1.4.1. Faktor Pendukung Keberhasilan

**Sasaran 1** . Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan

SASARAN 2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR		FAKTOR KEBERHASILAN
1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan	Indeks Ketahanan Pangan	1	Kebijakan dan regulasi mendukung produksi pangan
			2	Infrastruktur produksi memadai (irigasi, sarana pertanian).
			3	Diversifikasi pangan lokal berkembang.
			4	SDM pertanian dan pangan terlatih.
			5	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tersedia.
			6	Lumbung pangan masyarakat aktif.
			7	Operasi pasar dan gerakan pangan murah berjalan.
			8	Sinergi OPD dan desa baik.
			9	Edukasi konsumsi B2SA rutin.
			10	Pengawasan mutu pangan berjalan.
			11	Sistem SKPG berfungsi.
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip OPD	1	Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
			2	Kepemimpinan OPD yang mendukung transparansi dan evaluasi kinerja.
			3	Komitmen seluruh unit kerja OPD untuk menyusun dokumen

				perencanaan dan laporan kinerja sesuai standar.
			4	Pelatihan dan pendampingan dari Biro Organisasi/BPKP dalam penyusunan dokumen kinerja.

### 3.1.5. 2. Faktor Penghambat Keberhasilan

**Sasaran 1** . Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan

SASARAN 2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR		FAKTOR PENGHAMBAT
1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan	Indeks Ketahanan Pangan	1	Alih fungsi lahan pangan
			2	Produktivitas rendah.
			3	Ketergantungan pada satu komoditas (beras).
			4	Sarana penyimpanan belum memadai.
			5	Anggaran pengadaan terbatas.
			6	Biaya distribusi tinggi.
			7	Fluktuasi harga dan spekulasi pasar..
			8	Pengawasan pangan belum optimal
			9	Peredaran pangan tidak memenuhi standar.
			10	SDM pengawas terbatas.
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip OPD	1	Rendahnya disiplin pengumpulan data dan pelaporan kinerja..
			2	Perubahan kebijakan atau prioritas program yang tidak diikuti dengan pembaruan dokumen kinerja.

### 3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Efisiensi penggunaan Sumber Daya diukur berdasarkan perbandingan persentase penyerapan anggaran dengan persentase capaian kinerja dikalikan 100. Ada beberapa kegiatan yang menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya, seperti tergambar dalam tabel berikut ini;

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efesiensi
1	2	3	4	5	6=(5/4*100)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	96,31	3,69
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Keselarasan Dokumen Perencanaan Penanggaran dan evaluasi perangkat daerah	100	99,76	0,24
1,1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100	-
1,1,2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	100	-
1,1,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	100	100	-
1,1,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	100	100	-
1,1,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	100	100	-
1,1,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	100	-
1,1,7	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	100	99,48	0,52

1,1,8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100	100	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah daerah	97,73	96,59	1,14
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	95,45	95,84	-0,39
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	99,98	0,02
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	99,73	0,27
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	100	99,65	0,35
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100	100	0,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	95,82	4,18
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	99,92	0,08
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	96,41	3,59
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100	85,43	14,57
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	100	0,00
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	100	100	0,00

1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100	100	0,00
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	100	0,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100	98,12	1,88
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	100	98,12	1,88
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100	90,02	9,98
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	100	0,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	89,83	10,17
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	erlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100	98,26	1,74
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100	97,04	2,96
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	98,36	1,64
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	99,69	0,31
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	75,00	98,16	-23
2.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	98,16	1,84

2.1.1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0,00	98,16	-98,16
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	99,89	96,30	3,60
3.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurnya Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan Harga	100	99,02	0,98
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	100,00	100,00	0,00
3.1.2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100,00	98,98	1,02
3.1.3	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	100,00	100,00	0,00
3.1.4	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	100,00	98,96	1,04
3.1.5	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	100,00	100,00	0,00
3.1.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	100,00	96,69	3,31
3.1.7	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	100,00	99,74	0,26
3.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	100	50,09	50,09
3.2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	23	23	100,00
3.2.2	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang Terpelihara (ton)	23.000	41,92	0,18

3.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terwujudnya Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	100	99,74	0,26
3.3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	100,00	100,00	0,00
3.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	100,00	99,69	0,31
3.3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	100,00	99,77	0,23
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	68,49	97,21	-29
4.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100,00	95,46	4,54
4.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	100,00	95,46	4,54
4.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kabupaten/kota	100,00	99,74	0,26
4.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	100,00	99,18	0,82
4.2.2	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	100,00	99,95	0,05

5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Percentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Percentase)	100,00	99,12	0,88
5.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100,00	99,12	0,88
5.1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	100,00	99,12	0,88

Berdasarkan Tabel diatas , realisasi anggaran telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja. Perbandingan antara anggaran yang direalisasikan dengan capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat dicapai dengan tingkat serapan anggaran yang proporsional. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah memperhatikan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Upaya efisiensi dilakukan melalui pengendalian belanja, optimalisasi perencanaan kegiatan, serta penyesuaian terhadap kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, koordinasi antar unit kerja dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal turut berkontribusi dalam menekan biaya operasional tanpa menghambat pencapaian kinerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada periode pelaporan telah dilaksanakan secara efisien dan mendukung pencapaian kinerja instansi. Ke depan, instansi akan terus melakukan penyempurnaan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran guna meningkatkan efisiensi serta memastikan setiap sumber daya yang digunakan memberikan nilai tambah yang optimal bagi pencapaian tujuan organisasi.

## 2.2. REALISASI KEUANGAN

Analisis Akuntabilitas Keuangan tahun 2025 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Program, kegiatan dan Subkegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.104.378.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.919.475.550,00 atau 96,38 % dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100 %. Adapun rincian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 9. Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan 2025

No	Uraian	Tahun 2024
1	Renstra	5.500.891.800,00
2	Pagu	5.104.378.120,00
3	Realisasi	4.919.475.550,00

Secara lengkap, pagu dan realisasi penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 per program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Jumlah dan Realisasi Penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Tahun Anggaran 2025

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
	<b>5.1 BELANJA OPERASI</b>	<b>4.926.661.570</b>	<b>4.747.541.050</b>	<b>179.120.520</b>	<b>96,36</b>
	5.1.01. BELANJA PEGAWAI	2.600.203.110	2.492.100.041	108.103.069	95,84
	5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA	2.301.458.460	2.230.452.689	71.005.771	96,91
	5.1.06. BELANJA BANTUAN SOSIAL	25.000.000	24.988.320	11.680	99,95
	<b>5.2 BELANJA MODAL</b>	<b>177.716.550</b>	<b>171.930.500</b>	<b>5.786.050</b>	<b>96,74</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>5.104.378.120</b>	<b>4.919.471.550</b>	<b>184.906.570</b>	<b>96,38</b>
<b>Peningkatan Akuntabilitas Kinerja</b>					
<b>NILAI SAKIP OPD</b>		4.114.895.898	3.962.897.402	151.998.496	96,31
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.114.895.898	3.962.897.402	151.998.496	96,31

1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.224.800	33.146.600	78.200	99,76
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	3.500.000	-	100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.275.000	2.275.000	-	100,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.675.000	1.675.000	-	100,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.250.000	1.250.000	-	100,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.675.000	1.675.000	-	100,00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.850.000	5.850.000	-	100,00
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.921.800	78.200	99,48
1.1.8	Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.999.800	1.999.800	-	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.176.100.710	3.067.908.973	108.191.737	96,59
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.600.203.110	2.492.100.041	108.103.069	95,84
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	575.897.600	575.808.932	88.668	99,98
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.180.062	56.028.970	151.092	99,73
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.680.062	43.528.970	151.092	99,65
1.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.500.000	12.500.000	-	100,00

1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.500.326	242.908.827	10.591.499,00	95,82
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.024.710	14.013.113	11.597	99,92
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.066.716	138.900.166	5.166.550	96,41
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.150.000	31.737.500	5.412.500	85,43
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.258.900	8.258.900	-	100,00
1.4.5	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	5.500.000	-	100,00
1.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.500.000	1.500.000	-	100,00
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.000.000	42.999.148	852	100,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.500.000	22.077.000	423.000	98,12
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.500.000	22.077.000	423.000	98,12
1,6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.800.000	246.461.232	27.338.768,00	90,02
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	268.800.000	241.461.232	27.338.768	89,83
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.590.000	294.365.800	5.224.200	98,26
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.780.000	133.708.500	4.071.500	97,04
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.810.000	48.009.800	800.200	98,36

1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	113.000.000	112.647.500	352.500	99,69
	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan keterjangkauan				
	Indeks Ketahanan Pangan	989.482.222	956.574.148	32.908.074	96,67
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	28.728.140	28.199.500	528.640	98,16
2.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.728.140	28.199.500	528.640	98,16
2.1.1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	28.728.140	28.199.500	528.640	98,16
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	781.625.840	752.680.508	28.945.332	96,30
3.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	319.413.920	316.289.040	3.124.880	99,02
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3.825.000	3.825.000	-	100,00
3.1.2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	107.750.000	106.650.000	1.100.000	98,98
3.1.3	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	15.275.800	15.275.800	-	100,00
3.1.4	Pemantauan Stok Pangan	77.870.000	77.058.800	811.200	98,96
3.1.5	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	74.863.020	74.862.300	720	100,00
3.1.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	36.411.800	35.207.800	1.204.000	96,69
3.1.7	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	3.418.300	3.409.340	8.960	99,74

3.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	390.195.000	364.561.923	25.633.077	93,43
3.2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	290.950.000	289.967.670	982.330	99,66
3.2.2	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	99.245.000	74.594.253	24.650.747	75,16
3.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	72.016.920	71.829.545	187.375	99,74
3.3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5.915.220	5.915.220	-	100
3.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	44.081.000	43.943.625	137.375	99,69
3.3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	22.020.700	21.970.700	50.000	99,77
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	97.237.422	94.525.820	2.711.602	97,21
4.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	57.469.911	54.860.500	2.609.411	95,46
4.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	57.469.911	54.860.500	2.609.411	95,46
4.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.767.511	39.665.320	102.191	99,74
4.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	10.675.000	10.587.000	88.000	99,18
4.2.2	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	29.092.511	29.078.320	14.191	99,95
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	81.890.820	81.168.320	722.500	99,12
5.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	81.890.820	81.168.320	722.500	99,12
5.1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	81.890.820	81.168.320	722.500	99,12
JUMLAH BELANJA DAERAH		5.104.378.120	4.919.471.550	184.906.570	96,38

## **2.3. RENCANA TINDAKLANJUT**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan tindak lanjut terpadu untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, stabilisasi harga serta keterjangkauan pangan, dan peningkatan kualitas serta keamanan pangan. Produksi pangan ditingkatkan melalui optimalisasi potensi lokal dan pendampingan kelompok tani, sementara cadangan pangan diperkuat melalui pengelolaan dan distribusi yang lebih terencana. Stabilisasi harga dan keterjangkauan pangan dijaga melalui pemantauan ketersediaan dan koordinasi lintas sektor, serta intervensi strategis saat fluktuasi harga. Peningkatan kualitas dan keamanan pangan dilakukan melalui pengawasan mutu, penerapan standar pangan aman, dan edukasi masyarakat, sehingga seluruh program berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1. Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan
2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
3. Stabilisasi Harga dan Keterjangkauan Pangan
4. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan
5. Penguatan Sistem Data dan Monitoring
6. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor

## **2.4. PERBAIKAN PERENCANAAN KINERJA**

Pada tahun 2025 Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak melaksanakan perbaikan Perencanaan Kinerja.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2025 telah merealisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan melalui Dana APBD II yang dituangkan dalam 5 (lima) program dan 14 (Empat belas kegiatan) dan 41 (Empat Puluh Satu) subkegiatan dan telah mencapai target yang diharapkan. Realisasi sebesar Rp. 4.919.471.550,- dengan capaian keuangan sebesar **96,38 %** dari total dana yang dianggarkan sebesar Rp.5.104.378.120,-. Dari uraian diatas, capaian kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dana APBD II , secara umum dari misi yang sudah ditetapkan dalam Renstra telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari pengukuran kinerja pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang ditentukan. Keberhasilan ini juga telah didukung penuh oleh kesungguhan seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan program/kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Walaupun secara umum Pemerintah sudah mampu menyediakan pangan dan mendistribusikannya secara merata keseluruh daerah, sehingga pangan mudah dijangkau, tetapi belum menjadi jaminan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memenuhi kebutuhan pangannya dalam jumlah jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, berimbang, aman dan halal, sebagaimana dimanatkan oleh peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan, karena pada kenyataannya masih terdapat sebagian masyarakat yang tinggal di daerah rawan pangan yang belum mampu mengakses pangan. Kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat yang sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan

#### 4.2. Rekomendasi

Berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat beberapa rencana strategis yang dirancang untuk mencapai target kinerja pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi maka diperlukan suatu penyempurnaan metode pengembangan Kinerja PNS
2. Pengembangan dan integrasi aplikasi serta penggunaan kecerdasan dalam seluruh layanan kepegawaian dalam Merespon dinamika dan perubahan organisasi.
3. Perlunya Peningkatan Sumber daya manusia melalui pelatihan atau bimbingan teknis pada Pejabata fungsional.

Semoga LKJiP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak, 30 Januari 2026

Kepala Dinas,



**Drs. NASRUL EFFENDI**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700107 198908 1 001

